



**JURNAL ILMIAH
MULTIDISIPLIN ILMU**

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI:<https://doi.org/10.69714/9n15ep33>

**PENERAPAN *GOOD TOURISM GOVERNANCE* DI WISATA CAGAR BUDAYA ISTANA
MAIMUN DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OLEH DINAS
PARIWISATA KOTA MEDAN**

Angelina Esteria Riama^{a*}, Erika Revida^b

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Illu Administrasi Publik, angelinaesteriariama@gmail.com, Universitas Sumatera Utara, Medan

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Illu Administrasi Publik, erika@usu.ac.id, Universitas Sumatera Utara, Medan
* Penulis Korespondensi: Angelina Esteria Riama

ABSTRACT

Maimun Palace is a tourist destination included in Medan's cultural heritage sites and holds significant potential for supporting sustainable tourism. Therefore, the implementation of Good Tourism Governance (GTG) is crucial for the management, development, and preservation of this tourist destination. This study aims to analyze the extent to which the principles of GTG are implemented by the Medan City Tourism Office, in collaboration with the Sultan Ma'moen Al Rasyid Foundation, in managing the Maimun Palace cultural heritage site to achieve sustainable tourism.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews with the Medan City Tourism Office, the Sultan Ma'moen Al Rasyid Foundation, business actors, tour guides, local communities, and tourists, as well as through observation and documentation. The data and information obtained were analyzed by researchers using Sunaryo's (2013) theory of Good Tourism Governance, which is relevant to the research problem. These ten principles include participation communities, stakeholders involvement, local ownership, resource sustainability, community aspirations, environmental carrying capacity, program monitoring & evaluation, environmental accountability, related community training, and publicity and advocacy of local cultural values are among these principles.

Based on research conducted by researchers, the results show that the implementation of Good Tourism Governance at the Maimun Palace Cultural Heritage Site by the Medan City Tourism Office has been carried out, but not optimally. This can be seen from the limited community participation in economic aspects, weak coordination between stakeholders, and the need to improve the principles of environmental accountability and promotion of local culture. Therefore, there is a need to enhance cross-sector collaboration, community involvement in decision-making, and sustainable strategies covering economic, social, and environmental aspects. Implicitly, optimizing GTG principles is key to strengthening sustainable tourism governance in regional cultural heritage destinations.

Keywords: Good Tourism Governance, Sustainable Tourism, Maimun Palace, Cultural Haritage

Abstrak

Istana Maimun adalah destinasi wisata yang masuk kedalam salah satu cagar budaya Kota Medan dan memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Untuk itu, penerapan *Good Tourism Governance* (GTG) ataupun dikenal tata kelola pariwisata yang baik menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian kawasan destinasi objek wisata ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip GTG diterapkan Dinas pariwisata Kota Medan melalui kerjaasama dengan pengelola wisata yaitu Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid dalam pengelolaan wisata cagar budaya Istana Maimun guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Medan, Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid, pelaku usaha, pemandu wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan, serta melalui observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori *Good Tourism Governance* dari [13] melalui sepuluh prinsip, yaitu partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring & evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai-nilai budaya kelokalan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Tourism Governance* di Wisata Cagar Budaya Istana Maimun oleh Dinas Pariwisata Kota Medan telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang masih terbatas pada aspek ekonomi, koordinasi antar pemangku kepentingan yang lemah, serta prinsip akuntabilitas lingkungan dan promosi budaya lokal yang perlu ditingkatkan. Karena itu, diperlukan peningkatan kolaborasi lintas sektor, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan strategi berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implikasinya, optimalisasi prinsip GTG menjadi kunci penguatan tata kelola pariwisata secara berkelanjutan di destinasi cagar budaya daerah.

Kata Kunci: Good Tourism Governance, Pariwisata Berkelanjutan, Istana Maimun, Cagar Budaya

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian global maupun nasional. [15] menyatakan bahwa pariwisata meningkatkan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendatangkan devisa. Data dari World Travel and Tourism Council menunjukkan bahwa pada 2024, sektor ini menyumbang \$10,9 triliun atau sekitar 10% dari PDB global serta menciptakan 357 juta lapangan kerja (WTTC, 2025). Di Indonesia, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 4% pada 2024 dengan serapan tenaga kerja mencapai 25,01 juta orang (Kemenko Perekonomian, 2025), yang menunjukkan pentingnya pengembangan sektor ini secara optimal.

Sektor pariwisata berpotensi memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. [18] menekankan bahwa pariwisata dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan devisa, sementara [10] menyoroti dampak positifnya terhadap pendapatan, pelestarian lingkungan, dan penguatan budaya lokal. [5] menambahkan bahwa sektor ini mampu mendorong sektor lain dan menarik investor, sementara data [47] menunjukkan peningkatan devisa dari \$3,31 miliar pada 2020 menjadi \$7,03 miliar pada 2022, meski sempat terdampak pandemi COVID-19.

Namun, pengelolaan pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan risiko, seperti kerusakan lingkungan dan komersialisasi budaya. [4] menegaskan bahwa pembangunan pariwisata yang tidak terencana dapat mengancam nilai lokal, sedangkan [15] menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya. [9] menambahkan bahwa pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan serta kebutuhan masyarakat lokal, sehingga kolaborasi pemangku kepentingan menjadi sangat penting.

Dalam konteks tersebut, konsep *Good Tourism Governance* (GTG) dikembangkan sebagai kerangka tata kelola destinasi wisata yang berorientasi keberlanjutan. [16] dalam [28] menjelaskan bahwa GTG mencakup sepuluh prinsip, termasuk partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan dan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai-nilai budaya kelokalan. Penerapan GTG berperan dalam mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan [29].

Kota Medan memiliki destinasi wisata cagar budaya, salah satunya Istana Maimun, yang menjadi ikon sejarah Kesultanan Deli dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara [23]. Pengelolaan Istana Maimun dilakukan oleh Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid dengan peran Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai fasilitator (Wawancara dengan Kris Jhon Predy Ginting, 2025). Meskipun jumlah kunjungan tinggi, pengelolaannya menghadapi tantangan seperti kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, minimnya

monitoring berkelanjutan, serta keterbatasan promosi dan fasilitas. Kondisi ini menunjukkan urgensi penerapan prinsip GTG untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, khususnya di destinasi cagar budaya seperti Istana Maimun.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan kunjungan, perjalanan, dan menghabiskan waktu disuatu tempat tertentu, untuk tujuan rekreasi, pendidikan, budaya dan bisnis [12] [13] dalam [6] menambahkan bahwa pariwisata bersifat multidimensi karena melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Sementara itu, secara umum, pariwisata memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. [23] menegaskan bahwa pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, serta melestarikan nilai budaya lokal. Selain itu, Inskeep (1991) [43] menyebut pariwisata berfungsi sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya. Dengan demikian, pariwisata berperan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2.2. Good Tourism Governance

Good Tourism Governance (GTG) merupakan adaptasi konsep *Good Governance* dalam sektor pariwisata yang menekankan partisipasi tiga aktor utama: pemerintah, masyarakat, dan swasta [13] dalam [30]. [13] mengemukakan sepuluh prinsip utama GTG, antara lain partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan dan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai-nilai budaya kelokalan. [41] menegaskan bahwa penerapan GTG harus berlandaskan tiga aspek utama, yaitu kebijakan yang jelas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan.

2.3. Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)

Pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan sektor pariwisata yang meningkatkan kapasitas akomodasi dan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tetap mengendalikan dampak lingkungan agar manfaat positif dimaksimalkan dan dampak negatif diminimalkan [41]. Sejalan dengan itu, [40] menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. [27] menegaskan bahwa tiga pilar utama pariwisata berkelanjutan adalah ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya lokal, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan warisan sejarah yang harus dijaga, meskipun kesadaran masyarakat dalam pelestariannya masih rendah [27] Kemudian [19] menambahkan bahwa cagar budaya memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi yang menjadi identitas bangsa. Hal ini membedakan cagar budaya menjadi warisan berwujud, seperti bangunan dan artefak, serta warisan tak berwujud seperti tradisi dan bahasa [37]. Selanjutnya, [36] menekankan bahwa pelestarian harus dilakukan melalui konservasi, restorasi, dan edukasi. Sehingga perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci agar cagar budaya tetap lestari bagi generasi mendatang [35].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami penerapan *Good Tourism Governance* di Wisata Cagar Budaya Istana Maimun oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fenomena di lapangan. Penelitian dilakukan di dua lokasi, yakni Istana Maimun (Jl. AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan) dan Dinas Pariwisata Kota Medan (Jl. Prof. H. M. Yamin No.40, Kec. Medan Timur) sebagai pengelola wisata cagar budaya. Pemilihan lokasi ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan wisata, khususnya peran Dinas Pariwisata dalam merancang, menerapkannya, dan mengawasi kebijakan pengelolaan serta menjaga kelestarian dan daya tarik wisata. Sumber data terdiri atas data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari laporan dan dokumentasi. Validitas data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan serta dokumen pendukung untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, mencakup informan kunci (Perwakilan Dinas Pariwisata Kota Medan), informan utama (Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid), dan informan pendukung (Pemandu Wisata, Pelaku Usaha, dan Wisatawan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Tourism Governance* di Wisata Cagar Budaya Istana Maimun

Penerapan *Good Tourism Governance* di Wisata Cagar Budaya Istana Maimun bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan destinasi bersejarah ini dilakukan secara kolaboratif dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. *Good Tourism Governance* atau tata kelola kepariwisataan yang baik merupakan adaptasi dari konsep Good Governance yang menekankan keterlibatan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta [16]. Dengan demikian, pengelolaan wisata Istana Maimun idealnya melibatkan Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai pihak pemerintah, pihak pengelola Istana, serta masyarakat lokal agar tercipta sinergi yang mampu menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan wisata tersebut.

4.1.1 Partisipasi Masyarakat Terkait

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam *Good Tourism Governance* (GTG) karena mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. [13] dalam [28] menegaskan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pariwisata. Sejalan dengan [8], masyarakat juga berperan sebagai penyedia jasa, pelaku usaha lokal, dan penjaga nilai budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di wisata cagar budaya Istana Maimun telah berjalan melalui kegiatan ekonomi seperti pemandu wisata, petugas loket, satpam, dan pelaku UMKM. Dinas Pariwisata Kota Medan juga melakukan sosialisasi, workshop, dan gerakan sadar wisata. Namun, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada aspek ekonomi dan belum mencakup perencanaan maupun pengambilan keputusan, padahal [44] menekankan pentingnya libatkan aktif masyarakat agar tercapai keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis guna mendukung terwujudnya tata kelola pariwisata yang berkelanjutan sesuai prinsip GTG.

4.1.2 Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam penerapan *Good Tourism Governance* karena menjamin pengelolaan pariwisata berjalan inklusif dan berkelanjutan [16]; [39]. Prinsip ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan komunitas untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Permenparekraf No. 14 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa keberhasilan destinasi bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata cagar budaya Istana Maimun melibatkan berbagai aktor, seperti Dinas Pariwisata Kota Medan, Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid, pihak swasta (Bank Indonesia dan Nippon Paint), komunitas sadar wisata, mahasiswa, serta media promosi seperti GenPI. Kolaborasi ini tampak dalam promosi digital, event budaya, dan revitalisasi bangunan bersejarah. Namun, keterlibatan tersebut masih bersifat formal dan belum menyentuh tahap perencanaan serta pengambilan keputusan, terutama dalam melibatkan masyarakat lokal. Prinsip keterlibatan pemangku kepentingan di Istana Maimun sudah berjalan tetapi belum optimal. Minimnya komunikasi terbuka dan koordinasi antarpihak membuat peran aktor masih terfragmentasi. Diperlukan penguatan mekanisme kolaboratif dan ruang dialog yang setara agar semua pihak dapat berkontribusi aktif, sehingga tata kelola wisata Istana Maimun lebih selaras dengan prinsip *Good Tourism Governance* dan tujuan pariwisata berkelanjutan.

4.1.3 Kemitraan dan Kepemilikan Lokal

Kemitraan dan kepemilikan lokal merupakan prinsip penting dalam penerapan *Good Tourism Governance* (GTG) karena memberi ruang partisipasi nyata bagi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Prinsip ini menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan secara adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kemitraan menjadi kunci dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan. Di Istana Maimun, bentuk kemitraan terlihat dari keterlibatan masyarakat sebagai pelaku UMKM, pemandu wisata, dan penyedia jasa, meski pengelolaan formal masih dipegang oleh Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sementara Dinas Pariwisata Kota Medan mendorong kemitraan melalui program Gelar Melayu Serumpun dan kolaborasi pentahelix lintas sektor. Kolaborasi antar pelaku wisata dan masyarakat cukup baik meski sebagian besar masih bersifat informal. Pengunjung menilai keterlibatan masyarakat lokal penting untuk memperkuat identitas budaya Melayu Deli, namun pelaku usaha kecil mengeluhkan kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang masih bersifat *top-down*. Penerapan prinsip kemitraan dan kepemilikan lokal di Istana Maimun sudah berjalan, tetapi partisipasi masyarakat masih terbatas pada aspek ekonomi. Artinya, kemitraan telah terjalin dalam praktik, namun kepemilikan lokal belum terwujud secara struktural. Untuk menerapkan prinsip GTG secara utuh, masyarakat perlu diberi ruang lebih luas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna menciptakan tata kelola wisata yang berkelanjutan, adil, dan berbasis pemberdayaan lokal.

4.1.4 Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan merupakan prinsip utama *Good Tourism Governance* (GTG) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Prinsip ini menekankan agar kegiatan pariwisata memanfaatkan sumber daya secara bijak dan efisien agar kebermanfaatannya tetap terjaga untuk generasi mendatang [16]; [39]. Pada konteks wisata cagar budaya Istana Maimun, hal ini relevan karena kawasan tersebut merupakan ikon sejarah dan budaya yang memiliki sumber daya fisik, sosial, dan ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan. Upaya pemanfaatan sumber daya di Istana Maimun telah dilakukan melalui pendekatan regulatif dan kolaboratif. Dinas Pariwisata Kota Medan mengatur pengelolaan kawasan melalui Peraturan Wali Kota dan SK Cagar Budaya yang wajibkan setiap kegiatan restorasi dan pemeliharaan berkoordinasi dengan tim ahli.

Selain itu, pendekatan *Pentahelix* diterapkan dengan melibatkan akademisi, komunitas, swasta, dan media melalui berbagai workshop dan FGD untuk menjaga keseimbangan aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala. Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid selaku pengelola utama terbatas dalam sumber daya dan dukungan teknis, sementara sebagian bangunan masih ditempati ahli waris, sehingga menghambat konservasi. Partisipasi masyarakat pun lebih dominan pada kegiatan operasional, belum dalam perencanaan strategis. Kondisi lingkungan juga masih memerlukan peningkatan pengelolaan kebersihan. Dengan demikian, penerapan prinsip pemanfaatan sumber daya berkelanjutan di Istana Maimun telah menunjukkan kemajuan melalui dasar regulatif dan kolaboratif, tetapi masih memerlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan agar keseimbangan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat terjaga secara berkelanjutan.

4.1.5 Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Prinsip mengakomodasi aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari *Good Tourism Governance* yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan pariwisata, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Menurut [16] serta [28], aspirasi masyarakat lokal perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan agar tercipta keharmonisan antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Dalam konteks Istana Maimun, Dinas Pariwisata Kota Medan berperan sebagai fasilitator melalui edukasi, kolaborasi pentahelix, dan pemberdayaan ekonomi kreatif, namun upaya tersebut belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyaluran aspirasi di kawasan Istana Maimun masih bersifat informal, seperti komunikasi melalui media sosial atau percakapan langsung, tanpa forum resmi yang terjadwal. Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid mengakui belum adanya musyawarah rutin, sementara pelaku UMKM menilai aspirasi mereka jarang ditindaklanjuti. Pemandu wisata dan pelaku usaha juga merasa ruang partisipasi masih terbatas, sedangkan wisatawan berharap kegiatan budaya Melayu Deli dapat digelar lebih rutin. Dengan demikian, penerapan prinsip ini belum berjalan optimal karena minimnya forum dialog formal, komunikasi satu arah, serta kurangnya kegiatan budaya berbasis masyarakat. Diperlukan mekanisme partisipatif yang terbuka, terjadwal, dan berkelanjutan agar aspirasi masyarakat benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan wisata berkelanjutan.

4.1.6 Daya Dukung Lingkungan

Penerapan prinsip daya dukung lingkungan merupakan unsur penting dalam *Good Tourism Governance* (GTG) karena menentukan keberlanjutan destinasi wisata. Sunaryo [16] menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan kapasitas fisik, biotik, sosial, ekonomi, dan budaya agar tidak melampaui kemampuan lingkungan. Dalam konteks Istana Maimun sebagai wisata cagar budaya, keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan kawasan menjadi kunci tata kelola berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip ini belum optimal. Meski kawasan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dan dilindungi melalui SK Wali Kota, belum ada pembatasan jumlah pengunjung atau kajian kapasitas maksimum. Pengelolaan masih bersifat edukatif dan kolaboratif melalui *Gerakan Sadar Wisata*, event budaya, serta kerja sama pentahelix antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan swasta. Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid juga menjaga kebersihan, menata pedagang, dan mengawasi fasilitas, namun belum berbasis data ilmiah daya dukung lingkungan.

Aktivitas wisata masih tergolong wajar, tetapi kepadatan pengunjung kadang menimbulkan ketidaknyamanan, peningkatan sampah, dan risiko kerusakan situs. Belum tersedia sistem teknis untuk mengatur kapasitas kunjungan maupun papan imbauan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, penerapan prinsip daya dukung lingkungan di Istana Maimun sudah berjalan, namun belum terstruktur dan berbasis data. Diperlukan kajian komprehensif serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan lingkungan lebih terarah dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

4.1.7 Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi merupakan elemen penting dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. [16] dalam [28] menyebutkan kegiatan ini meliputi penyusunan pedoman, penilaian dampak wisata, dan pengembangan indikator keberhasilan. Sejalan dengan [39], monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan serta mengidentifikasi kendala dan capaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi di kawasan wisata cagar budaya Istana Maimun telah dilakukan, namun belum bersifat formal dan sistematis. Dinas Pariwisata Kota Medan melakukan pemantauan melalui forum komunikasi berkala, sementara Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid melakukan evaluasi informal berdasarkan observasi dan tanggapan masyarakat. Namun, belum terdapat sistem evaluasi berbasis teknologi atau indikator terukur yang menjadi acuan bersama, sehingga evaluasi masih bersifat reaktif terhadap masalah di lapangan.

Pelaku usaha dan masyarakat lokal juga belum dilibatkan aktif, dan hasil evaluasi jarang disosialisasikan secara terbuka. Tidak ditemukan mekanisme formal seperti survei kepuasan, kotak saran, atau laporan publik. Dengan demikian, prinsip *Good Tourism Governance* dalam aspek monitoring dan evaluasi di Istana Maimun belum diterapkan optimal. Diperlukan sistem evaluasi yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berbasis indikator agar pengelolaan wisata berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

4.1.8 Akuntabilitas Terhadap Lingkungan

Prinsip akuntabilitas lingkungan dalam *Good Tourism Governance* menekankan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan terhadap dampak aktivitas pariwisata. Di kawasan wisata cagar budaya Istana Maimun, prinsip ini telah diupayakan melalui kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota Medan, Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid, masyarakat, dan pelaku wisata. Pemerintah menetapkan dasar hukum seperti Surat Keputusan dan Peraturan Wali Kota, serta melakukan edukasi dan koordinasi lintas instansi termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi dampak lingkungan pada event besar seperti Gelar Melayu Serumpun (GEMES). Pengelola juga menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, petugas kebersihan, dan papan larangan sebagai bentuk edukasi, sementara pemandu wisata turut menyampaikan pesan pelestarian lingkungan kepada pengunjung.

Namun, penerapan prinsip ini masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan wisatawan, yang terlihat dari perilaku membuang sampah sembarangan dan vandalisme. Observasi juga menunjukkan belum adanya sistem pemilahan sampah yang memadai serta regulasi tertulis yang kuat dari pengelola. Karena itu, diperlukan penguatan edukasi, pengawasan, dan partisipasi aktif semua pihak untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*). Dengan meningkatnya kesadaran dan kolaborasi, akuntabilitas lingkungan di Istana Maimun dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pariwisata berkelanjutan.

4.1.9 Pelatihan Masyarakat Terkait

Pelatihan masyarakat merupakan prinsip penting dalam *Good Tourism Governance* karena berfungsi meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan pariwisata. Menurut [16] pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan pendidikan dan pelatihan agar masyarakat

mampu berperan aktif sebagai pelaku sekaligus penjaga kelestarian budaya. Dalam konteks Istana Maimun, pelatihan menjadi kunci penguatan peran lokal dalam menjaga nilai sejarah dan meningkatkan kualitas layanan wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Medan telah melibatkan masyarakat melalui kegiatan seperti *workshop*, FGD, gerakan sadar wisata, dan pendampingan pelaku ekonomi kreatif. Namun, Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid mengakui belum adanya pelatihan formal yang terstruktur, sehingga sebagian besar keterampilan masyarakat diperoleh secara otodidak tanpa bimbingan berkelanjutan. Pemandu wisata dan pelaku UMKM juga menilai pelatihan yang ada belum menyentuh kebutuhan praktis seperti pelayanan, komunikasi, promosi digital, dan pengemasan produk budaya. Penerapan prinsip pelatihan masyarakat dalam kerangka *Good Tourism Governance* di Istana Maimun masih terbatas dan belum optimal. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk menyusun program pelatihan berkelanjutan yang berbasis kebutuhan lapangan guna mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan berbasis budaya.

4.1.10 Promosi dan Advokasi Nilai-Nilai Budaya Kelokalan

Promosi dan advokasi nilai budaya lokal merupakan aspek penting dalam penerapan *Good Tourism Governance*, berfungsi tidak hanya sebagai strategi pemasaran, tetapi juga media edukasi dan pelestarian budaya. [16] serta [28] menegaskan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mencerminkan identitas dan karakter lokal (*sense of place*) melalui promosi yang mengedepankan nilai budaya. Prinsip ini sejalan dengan [44] tentang Kepariwisataan yang menekankan pentingnya pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

Penerapan prinsip ini di Istana Maimun tampak melalui inisiatif Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid dan Dinas Pariwisata Kota Medan, seperti pertunjukan musik tradisional Melayu Deli, penyewaan pakaian adat, dan edukasi sejarah Kesultanan Deli. Pemerintah daerah juga mendorong promosi berbasis *pentahelix* dengan melibatkan sektor swasta, komunitas, dan media sosial. Namun, masih terdapat kendala seperti minimnya dukungan agen perjalanan, keterlibatan ahli waris, serta rendahnya minat generasi muda, sehingga dibutuhkan inovasi promosi agar lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, partisipasi pemandu wisata, pelaku usaha, dan wisatawan turut memperkuat promosi budaya. Pemandu berperan sebagai komunikator nilai budaya Melayu Deli, sementara wisatawan membantu memperluas jangkauan promosi melalui *User Generated Content* di media sosial. Berdasarkan observasi, promosi di Istana Maimun telah berjalan cukup baik melalui pertunjukan seni, event “Gelar Melayu Serumpun”, dan kolaborasi lintas sektor, meski masih perlu penguatan berkelanjutan dalam edukasi budaya, partisipasi masyarakat, dan sinergi antar pemangku kepentingan agar pariwisata cagar budaya ini dapat berkembang secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung nilai budaya Melayu Deli.

4.2 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Tourism Governance* di Wisata Cagar Budaya Istana Maimun dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan

Penerapan prinsip *Good Tourism Governance* (GTG) berperan penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di kawasan cagar budaya seperti Istana Maimun, karena menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan pemerintah, pengelola, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan wisatawan. Pengelolaan pariwisata tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga menjaga keaslian budaya dan kelestarian lingkungan. GTG menjadi landasan keseimbangan tiga aspek utama: ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat lokal, sosial-budaya melalui pelestarian identitas Melayu Deli, dan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Penerapan konsisten GTG diharapkan menciptakan destinasi yang berkeadilan sosial, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi.

4.2.1 Aspek Keberlanjutan Ekonomi

Penerapan prinsip *Good Tourism Governance* melalui aspek keberlanjutan ekonomi menekankan bagaimana destinasi wisata mampu memberi manfaat ekonomi optimal bagi masyarakat lokal. Menurut [16] dalam [24], keberlanjutan ekonomi mencakup penciptaan lapangan kerja dan penerapan upah adil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan distribusi keuntungan pariwisata yang merata.

Hasil penelitian di Istana Maimun menunjukkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku UMKM, pemandu wisata, penyewa baju adat, hingga pedagang souvenir. Pengelola wisata memprioritaskan tenaga kerja lokal dan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk revitalisasi kawasan serta penciptaan lapangan kerja. Dinas Pariwisata Kota Medan juga mendukung lewat event budaya seperti *Gelar Melayu Serumpun*,

penyediaan stan UMKM, dan promosi digital. Partisipasi masyarakat terbukti memberikan dampak ekonomi nyata sekaligus memperkuat daya tarik wisata.

Secara keseluruhan, keberlanjutan ekonomi di Istana Maimun berjalan positif berkat kolaborasi multipihak, meski masih menghadapi tantangan pada aspek pemberdayaan masyarakat, sinergi kelembagaan, dan perencanaan jangka panjang. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta strategi inklusif menjadi kunci mewujudkan pengelolaan wisata berkelanjutan.

4.2.2 Aspek Keberlanjutan Sosial-Budaya

Keberlanjutan sosial-budaya dalam pariwisata berkelanjutan bertujuan menjaga partisipasi aktif masyarakat lokal dan pelestarian nilai budaya sebagai identitas kawasan wisata. Aspek ini menekankan hubungan harmonis antara masyarakat, wisatawan, dan pengelola, sekaligus memastikan pelestarian aset budaya tetap menjadi prioritas. Penerapan *Good Tourism Governance* (GTG) di Istana Maimun penting untuk menciptakan pengelolaan wisata yang seimbang antara aspek ekonomi, budaya, dan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat lokal terlibat aktif dalam kegiatan seperti UMKM, pemandu wisata, penjaga tiket, penyedia jasa sewa baju adat, serta pedagang kuliner dan suvenir. Pengelola wisata memberi kesempatan dan fasilitas bagi masyarakat, sementara Dinas Pariwisata Kota Medan mendukung melalui pelatihan, gerakan sadar wisata, event budaya seperti Gelar Melayu Serumpun, serta promosi digital. Pemandu wisata berperan sebagai agen pelestari budaya, dan pelaku usaha menjual produk lokal yang mencerminkan nilai budaya tanpa merusak lingkungan.

Keberlanjutan sosial-budaya di Istana Maimun tercermin dari keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi multipihak. Meski masih terdapat tantangan dalam partisipasi dan kepedulian masyarakat, penerapan GTG telah membantu menyeimbangkan pelestarian budaya, kesejahteraan lokal, dan pengalaman wisata yang berkualitas. Penguatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi kelembagaan menjadi kunci mempertahankan keberlanjutan sosial-budaya secara berkelanjutan.

4.2.3 Aspek Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan merupakan aspek penting dalam pariwisata bertanggung jawab, di mana lingkungan yang terjaga menjadi daya tarik sekaligus penopang bagi masyarakat lokal dan destinasi wisata. Menurut [16] dalam [24], pariwisata berkelanjutan harus melindungi aset lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijak, serta meminimalkan dampak negatif kegiatan wisata. Penerapan prinsip *Good Tourism Governance* (GTG) menekankan regulasi yang jelas dan kolaborasi pemerintah, pengelola, swasta, serta masyarakat lokal untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisata dan keberlanjutan ekologis.

Di kawasan wisata Istana Maimun, pengelola telah berupaya menjaga kebersihan melalui penyediaan tempat sampah, pengangkutan limbah, pemeliharaan tanaman, serta edukasi bagi pengunjung dan pedagang. Dinas Pariwisata Kota Medan juga mendukung melalui workshop, FGD, dan promosi kesadaran lingkungan berbasis kearifan lokal. Partisipasi masyarakat lokal termasuk pedagang, pemandu, dan pelaku UMKM terlihat aktif meski pemilahan sampah dan regulasi formal masih perlu ditingkatkan. Secara umum, lingkungan sudah terjaga, namun pengawasan dan edukasi tambahan masih diperlukan. Dengan demikian, kolaborasi antar pihak telah mendukung penerapan keberlanjutan lingkungan di Istana Maimun, meski penguatan fasilitas, edukasi, dan pengawasan tetap diperlukan agar pengelolaan wisata semakin ramah dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip *Good Tourism Governance* di wisata cagar budaya Istana Maimun menunjukkan kontribusi positif terhadap upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, kemitraan lokal, keberlanjutan sumber daya, akuntabilitas lingkungan, serta promosi dan pelestarian budaya lokal telah diterapkan secara bertahap. Keberhasilan ini tercermin dalam adanya kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota Medan, yayasan, komunitas, pelaku UMKM, dan pihak swasta, serta upaya pelatihan, edukasi, dan promosi budaya, meskipun keterlibatan masyarakat masih terbatas pada aspek teknis, kesadaran lingkungan rendah, dan partisipasi generasi muda belum maksimal. Tantangan lain mencakup koordinasi yang belum merata, kapasitas kelembagaan yang terbatas, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi terstruktur, serta perlunya integrasi strategis masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu,

penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelibatan multipihak, dan integrasi nilai budaya lokal perlu ditingkatkan agar Istana Maimun dapat berperan maksimal sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang mendukung aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan *Good Tourism Governance* (GTG) di wisata cagar budaya Istana Maimun, peneliti menyarankan agar penerapan prinsip-prinsip GTG ditingkatkan secara menyeluruh untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Upaya ini mencakup peningkatan keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan melalui pelatihan, penguatan kapasitas, dan forum partisipatif. Koordinasi antar pemangku kepentingan perlu diperkuat dengan mekanisme berbasis pendekatan Pentahelix agar kolaborasi lintas sektor berjalan lebih efektif. Pelestarian sosial-budaya sebaiknya menjangkau semua generasi, terutama generasi muda, dengan integrasi budaya dalam kegiatan formal maupun non-formal serta pemanfaatan media digital. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan budaya sadar wisata, penguatan regulasi pengelolaan sampah dan konservasi, serta pemberian insentif atau sanksi terhadap perilaku pelaku wisata menjadi hal penting. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan GTG di Istana Maimun diharapkan dapat lebih optimal dan benar-benar mendukung terciptanya pariwisata berkelanjutan di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] D. E. Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- [2] Amaruddin, I. L. Muskananfola, E. Febriyanti, F. R. Pandie, M. F. Goa, Y. M. K. Letor, R. D. Pratiwi, et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- [3] D. Aromatica and A. R. Sudrajat, *Teori Organisasi: Konsep, Struktur dan Aplikasi*. Bandung: CV Amerta Media, 2021.
- [4] M. Ashoer, E. Revida, I. K. Dewi, M. M. Simarmata, Nasrullah, N. Mistriani, R. S. Samosir, et al., *Ekonomi Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [5] F. Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.
- [6] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- [7] A. Muftizar, S. IP, A. Saputro, A. Munandar, and I. Hendrasmo, *Pengelolaan Kinerja Pelestarian Cagar Budaya di Sektor Kebudayaan dan Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Adab, 2024.
- [8] Y. E. Rachmad, T. Hidayat, D. Darmayasa, A. F. M. A. Bakty, R. A. S. Mulya, N. Nurjannah, et al., *Buku Ajar Kebijakan & Manajemen Pariwisata*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- [9] S. Rahayu and M. G. Saragih, *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: CV Tungga Esti, 2022.
- [10] E. Revida, S. Purba, M. Simanjuntak, L. A. Permadi, M. M. Simarmata, E. Fitriyani, et al., *Manajemen Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- [11] Ridwan and I. Bangsawan, *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula*. Jambi: Anugerah Pratama Press, 2021.
- [12] Z. Setiawan, O. Yendri, B. A. Kusuma, R. P. Ishak, Y. Boari, N. Paddiyatu, and T. Kartika, *Buku Ajar Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [13] P. Srisusilawati, G. P. E. Kusuma, H. Budi, E. Haryanto, H. Nugroho, N. D. Satmoko, et al., *Manajemen Pariwisata*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- [15] Y. Sulistyadi, F. Eddyono, and D. Entas, *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Tangerang: Anugrah Utama Raharja, 2021.
- [16] B. Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- [17] UNDP, *Governance for Sustainable Development: Integrated, Inclusive, and Effective Governance Frameworks*. New York: United Nations Development Programme, 2020.

Jurnal/Skripsi

- [18] Aliansyah, H., & Hermawan, W. "Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat." *Bina Ekonomi*, vol. 23, no. 1, pp. 39–55, 2019.
<https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>

- [19] A. Apriliani, F. T. Ramdani, M. Fitriah, C. Wahyudin, M. J. Assayuti, A. A. Zulfa, *et al.*, “Tatakelola Eduwisata Cagar Budaya,” *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 9, no. 3, pp. 227–235, 2023. <https://doi.org/10.30997/qh.v9i3.10570>
- [20] F. T. Chahyadi, N. Winarti, and S. F. Riyadi, “Analisis Tata Kelola Cagar Budaya di Kabupaten Lingga,” *Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2024. <https://doi.org/10.62567/micjo.v11i2.27>.
- [21] R. C. Dewi and S. Suparno, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *Jurnal Media Administrasi*, vol. 7, no. 1, pp. 78–90, 2022. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.
- [22] A. Duha and I. Ilvaldo, “Analisis 4A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, dan Ancillary) dalam Objek Wisata Istana Maimun,” *Edutourism Journal of Tourism Research*, vol. 6, no. 1, pp. 71–89, 2024. <https://ejurnal.polnes.ac.id/index.php/edutourism/article/download/957/693>.
- [23] N. Fadilah, Z. Saritza, F. Aulia, M. F. Anwar, and I. Y. Simamora, “Strategi Pemko Medan dalam Mempertahankan Istana Maimun Sebagai Ikon Wisata Kota Medan,” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, vol. 3, no. 4, 2023. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i4.4432>.
- [24] K. Fajri, T. Hidayat, and N. Lanjau, “Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Eduwisata Enggang Gading,” *Tourism Scientific Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 151–166, 2020. <https://doi.org/10.32659/tsj.v6i1.123>.
- [25] S. Fikri and W. Utami, “Peran Peraturan Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Cagar Budaya,” *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, vol. 5, no. 1, pp. 67–79, 2019.
- [26] S. Hajar, F. Faustyna, and K. Kholik, “Muslim-Friendly Tourism Towards Good Tourism Governance,” *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 12, no. 2, pp. 142–161, 2022. <https://doi.org/10.26618/oijp.v12i2.8052>.
- [27] U. Hartati, “Cagar Budaya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal,” *Diakronika*, vol. 20, no. 2, pp. 143–151, 2020. <https://doi.org/10.24036/diakronika.vol20-iss2/155>.
- [28] I. K. Hidayat and S. Rahayu, “Good Tourism Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata di Kawasan Kotagede Kota Yogyakarta,” *Journal of Public Policy and Administration Research*, vol. 3, no. 4, pp. 545–561, 2018. https://www.academia.edu/download/87536353/12704_28012-1-SM.pdf.
- [29] F. Nurfaishal, “Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Magelang,” *Undergraduate Thesis, Universitas Tidar*, 2018. <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=718&bid=8159>.
- [30] G. W. Pradana, A. Rahman, and H. Haryono, “Tourism Village Management Requires Good Tourism Governance: Study in the Kampung Lampion Code 18 Yogyakarta Area,” *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, vol. 6, no. 1, pp. 20–27, 2021. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p20-27>.
- [31] Y. Pratama and M. Hidayat, “Pengelolaan Wisata Cagar Budaya di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 15, no. 2, pp. 117–131, 2020.
- [32] G. R. Prayoga, A. Subowo, and T. Afrizal, “Efektivitas Pengelolaan Aplikasi Visiting Jogja dalam Pengembangan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 13, no. 4, pp. 160–173, 2024. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47164>.
- [33] M. T. Rahmadi and C. S. B. br Pakpahan, “Istana Maimun: Potensi Pariwisata Bersejarah Sebagai Peluang Ekonomi Masyarakat Kota Medan,” *Nawasena: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, vol. 3, no. 3, pp. 33–39, 2024. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/nawasena/article/download/1827/1738>.
- [34] A. Riski and D. Syahriani, “Pengelolaan Wisata Cagar Budaya di Kota Medan: Studi Kasus Istana Maimun,” *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, vol. 8, no. 1, pp. 90–104, 2021.
- [35] U. Rusdia, “Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung,” *JISIPO/Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 5, no. 2, 2021. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/399>.
- [36] F. Safira, T. A. Salim, R. Rahmi, and M. K. J. A. Sani, “Peran Arsip dalam Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: Sistematika Review,” *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, vol. 41, no. 2, 2020. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v41i2.593>.
- [37] J. Silaen, Kushandajani, and H. T. Ardianto, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A Fie),” *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 12, no. 4, pp. 309–318, 2023. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/41389>.
- [38] R. S. G. Subroto, “Peran Tiga Aktor Governance dalam Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Edukasi (Studi Kasus di Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri),” *Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya*, 2017. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/6283/1/RONNY%20SUBROTO%20SURYO%20GURITNO.pdf>.

- [39] W. A. Utamy, E. Susanti, and N. Runiawati, “Good Tourism Governance dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting Kabupaten Berau,” *JANE–Jurnal Administrasi Negara*, vol. 14, no. 2, pp. 658–666, 2023. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45126>.
- [40] M. S. Wibowo and L. A. Belia, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan,” *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, vol. 6, no. 1, pp. 25–32, 2023. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58108>.
- [41] I. A. P. Widiati and I. Permatasari, “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) Berbasis Lingkungan pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung,” *Kertha Wicaksana*, vol. 16, no. 1, pp. 35–44, 2022. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.35-44>.
- [42] R. Yulianti and D. Suryanto, “Dampak Ekonomi Sektor Pariwisata terhadap UMKM,” *Jurnal Ekonomi Regional*, vol. 9, no. 4, pp. 102–118, 2022.
- [43] R. Zumaida, H. Koeswara, and D. Aromatica, “Strategi Pemerintah Kota dalam Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT): Sebuah Implikasi Intervensi Kebijakan Pengembangan Pariwisata,” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 160–176, 2022. <https://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/394>

Regulasi

- [44] Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>
- [45] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>
- [46] Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53497>

Internet

- [47] Badan Pusat Statistik, “Data Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Budaya di Indonesia,” Internet: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/06/18/a14ac9b0d02a074aac856dfb/statistik-wisatawan-nasional-2023.html>, Jun. 18, 2024 [Feb. 19, 2025, 15:30 WIB].
- [48] Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan (Perjalanan),” Internet: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMSMy/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-provinsi-tujuan.html>, 2025 [Mar. 3, 2025, 10:00 WIB].
- [49] Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2008–sekarang (Kunjungan),” Internet: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1MCMY/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk--2017---sekarang.html>, 2025 [Mar. 3, 2025, 10:14 WIB].
- [50] Dinas Pariwisata Kota Medan, *Laporan Kinerja dan Pengembangan Pariwisata Kota Medan 2023*, Medan: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023. Internet: <https://medantourism.pemkomedan.go.id/> [Mar. 2, 2025, 22:30 WIB].
- [51] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Mendongkrak Kinerja Sektor Pariwisata, Pemerintah Siapkan Berbagai Program Lintas Sektor,” Internet: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6253/mendongkrak-kinerja-sektor-pariwisata-pemerintah-siapkan-berbagai-program-lintas-sektor>, 2025 [Mar. 3, 2025].
- [52] Kumparan.com, “Sejarah Istana Maimun Medan beserta Fakta Unik dan Informasi Lengkapnya,” Internet: <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-istana-maimun-medan-beserta-fakta-unik-dan-informasi-lengkapnya-22oUwsQ7gNO>, 2024 [Feb. 20, 2025, 14:58 WIB].
- [53] Kompasiana.com, “Keberlanjutan dalam Pengelolaan Istana Maimun: Menjaga Warisan Budaya Indonesia,” Internet: <https://www.kompasiana.com/muhammadkhady3855/650d1aed08a8b50e8b6d40d3/keberlanjutan-dalam-pengelolaan-istana-maimun-menjaga-warisan-budaya-indonesia>, 2023 [Mar. 7, 2025, 15:03 WIB].
- [54] Liputan6.com, “Kemenbud Tetapkan 272 Warisan Budaya Takhbenda Indonesia dan 17 Cagar Budaya pada 2024,” Internet: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5795023/kemenbud-tetapkan-272-warisan-budaya-takhbenda-indonesia-dan-17-cagar-budaya-pada-2024?page=4>, 2024 [Feb. 20, 2025, 12:15 WIB].
- [55] Pemerintah Kota Medan, “Gelar Melayu Serumpun Resmi Dibuka, Riko Waas: Kebudayaan Bisa Jadi Sarana Promosi untuk Kenalkan Medan di Mata Dunia,” *Portal Medan*, Internet: <https://portal.medan.go.id/berita/gelar-melayu-serumpun-resmi-dibuka-rico-waas-kebudayaan-bisa->

- [jadi-sarana-promosi-untuk-kenalkan-medan-di-mata-dunia__read5217.html](#), 2025 [Jun. 10, 2025, 12:00 WIB].
- [56] Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, “Nomor PM.01/PW.007/MKP/2010,” Internet: <https://infoperaturan.id/peraturan-menteri-kebudayaan-dan-pariwisata-nomor-pm-01-pw-007-mkp-2010/>, 2010 [Feb. 19, 2025].
- [57] Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Sinergi Pemajuan Kebudayaan dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Zaman,” Internet: https://setkab.go.id/sinergi-pemajuan-kebudayaan-dalam-menghadapi-tantangan-perkembangan-zaman/?utm_source=.com, 2024 [Feb. 20, 2025, 13:58 WIB].
- [58] World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2024: Global Trends,” Internet: <https://wttc.org/research/economic-impact>, 2024 [Jun. 28, 2025, 23:10 WIB].